

No. Daftar FPEB: 258/UN40.A7.D1/P1/2020

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA
MODAL DENGAN STATUS WILAYAH ADMINISTRATIF SEBAGAI
VARIABEL MODERATOR
(Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali
Tahun Anggaran 2014-2018)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menempuh Ujian Sidang Sarjana
Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Akuntansi



Disusun oleh

MELI KAMELIANI

1602456

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

2020

Meli Kameliani, 2020

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN STATUS
WILAYAH ADMINISTRATIF SEBAGAI VARIABEL MODERATOR (Studi pada Pemerintah
Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali Tahun Anggaran 2014-2018)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA
MODAL DENGAN STATUS WILAYAH ADMINISTRATIF SEBAGAI
VARIABEL MODERATOR
(Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali
Tahun Anggaran 2014-2018)**

Oleh
Meli Kameliani

Sebuah skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis

©2020 Meli Kameliani
Universitas Pendidikan Indonesia
Juli 2020

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Skripsi ini tidak boleh di perbanyak seluruhnya atau sebagian, dengan dicetak
ulang, di foto kopi atau lainnya tanpa izin dari peneliti.

**LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI
UJIAN SIDANG**

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA
MODAL DENGAN STATUS WILAYAH ADMINISTRATIF SEBAGAI
VARIABEL MODERATOR**

**(Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali
Tahun Anggaran 2014-2018)**

Oleh
Meli Kameliani
1602456

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Nugraha, S.E., M.Si., Akt., CA.,

CTA., CPA

NIP. 196612261990011002

Pembimbing II



Rd. Dian Hardiana, S.Pd., M.Si.,

CTA., ACPA

NIP. 198605022019031016

Mengetahui,

Ketua Program Studi Pendidikan Akuntansi



Prof. Dr. H. Nugraha, S.E., M.Si., Akt., CA., CTA., CPA

NIP. 196612261990011002

Meli Kameliani, 2020

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN STATUS
WILAYAH ADMINISTRATIF SEBAGAI VARIABEL MODERATOR (Studi pada Pemerintah
Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali Tahun Anggaran 2014-2018)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA
MODAL DENGAN STATUS WILAYAH ADMINISTRATIF SEBAGAI
VARIABEL MODERATOR
(Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali
Tahun Anggaran 2014-2018)**

Meli Kameliani

**Pembimbing: Prof. Dr. H. Nugraha, S.E., M.Si., Akt., CA., CTA., CPA.,
Rd. Dian Hardiana, S.Pd., M.Si., CTA., ACPA**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan yang diukur melalui rasio derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD terhadap alokasi belanja modal dengan status wilayah administratif sebagai variabel moderator pada pemerintah kabupaten/kota se-Jawa dan Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Pulau Jawa dan Bali yang berjumlah 122 kabupaten/kota. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh yaitu seluruh populasi digunakan sebagai sampel dengan periode penelitian selama 5 tahun yaitu 2014-2018. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah alokasi belanja modal, sedangkan variabel independennya adalah kinerja keuangan yang diukur melalui rasio derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD. Adapun variabel moderasinya adalah status kota/kabupaten. Kesimpulan penelitian diperoleh hasil bahwa kedua model regresi berarti sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD terhadap alokasi belanja modal dengan status wilayah administratif sebagai variabel moderasi. Kemudian hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kemandirian daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, serta derajat desentralisasi dan efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Adapun status wilayah administratif memoderasi pengaruh derajat desentralisasi terhadap alokasi belanja modal, namun status wilayah administratif tidak memoderasi pengaruh kemandirian daerah dan efektivitas PAD terhadap alokasi belanja modal.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Derajat Desentralisasi, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Alokasi Belanja Modal, Status Wilayah Administratif Kabupaten/Kota.

***THE EFFECT OF FINANCIAL PERFORMANCE ON ALLOCATION OF
CAPITAL EXPENDITURE WITH THE ADMINISTRATIVE REGION
STATUS AS A MODERATING VARIABLE***
***(Study on the District/City Governments in Java and Bali Island in the Fiscal
Year of 2014-2018)***

Meli Kameliani

***Advisor: Prof. Dr. H. Nugraha, S.E., M.Si., Akt., CA., CTA., CPA.,
Rd. Dian Hardiana, S.Pd., M.Si., CTA., ACPA***

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of financial performance measured by the degree of decentralization, financial independence and effectiveness of PAD on allocation of capital expenditure with the administrative region status as a moderating variable at District/City Governments in Java and Bali Island. This research used descriptive study with verification methods. The population in this research were all basic district and city in Java and Bali Island, totaling 122 district/city. The sampling technique used saturation sampling that all the population used as a sample with a research period of 5 years, that is in 2014-2018. Dependent variable in this research is allocation of capital expenditure, and independent variable is financial performance measured by the degree of decentralization, financial independence and effectiveness of PAD. And the moderating variable is district/city status. Conclusions of the research show that both of the regression model can be used to explain the effect of the degree of decentralization, financial independence and effectiveness of PAD on allocation on capital expenditure. And then the results of hypothesis analyst show that financial independence has a significant effect on allocation of capital expenditure, along with the degree of decentralization and effectiveness of PAD has no effect on allocation of capital expenditure. Meanwhile administrative region status moderated the effect of the degree of decentralization on allocation of capital expenditure, however administrative region status doesn't moderated the effect of financial independence and effectiveness of PAD on allocation of capital expenditure. Key word: Financial Performance, The Degree of Decentralization, Financial Independence, Effectiveness of PAD, Allocation of Capital Expenditure, Administrative Region Status District/City

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah Penelitian.....	9
C. Rumusan Masalah Penelitian.....	14
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Teori yang Relevan.....	18
1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	18
2. Pengelolaan Keuangan Daerah	19
a. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.....	20
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	20
c. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah.....	20
3. Kinerja Keuangan Daerah.....	24
a. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah	25
b. Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah	25
c. Indikator Kinerja Keuangan Daerah.....	26
d. Analisis Rasio Kinerja Keuangan Daerah	27
4. Belanja Daerah.....	33
a. Pengertian Belanja Daerah	33
b. Jenis-Jenis Belanja Daerah	34
5. Belanja Modal.....	37

Meli Kameliani, 2020

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN STATUS WILAYAH ADMINISTRATIF SEBAGAI VARIABEL MODERATOR (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali Tahun Anggaran 2014-2018)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

a.	Pengertian Belanja Modal	37
b.	Alokasi Belanja Modal	37
c.	Objek Belanja Modal	38
d.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal	40
6.	Wilayah Administratif	40
a.	Konsep Dasar Wilayah	40
b.	Wilayah Administratif	41
c.	Perbedaan Karakteristik Kabupaten dan Kota	42
B.	Hasil Penelitian Terdahulu	43
C.	Kerangka Pemikiran	53
D.	Hipotesis Penelitian	57
	BAB III METODE PENELITIAN	58
A.	Desain Penelitian	58
B.	Operasionalisasi Variabel	59
1.	Variabel Bebas (Variabel Independen)	59
2.	Variabel Terikat (Variabel Dependen)	60
3.	Variabel Moderator (<i>Moderating Variable</i>)	60
C.	Populasi dan Sampel	61
1.	Populasi	61
2.	Sampel	63
D.	Teknik Pengumpulan Data	64
E.	Teknik Pengolahan Data dan Pengujian Hipotesis	64
1.	Analisis Deskriptif	64
2.	Analisis Inferensial	66
a.	Metode Estimasi Model Regresi Data Panel	67
b.	Pemilihan Model Estimasi Model Regresi Data Panel	68
c.	Uji Asumsi Klasik untuk Data Panel	70
3.	Pengujian Hipotesis Penelitian	72
a.	Analisis Regresi Linier Multipel Data Panel	72
b.	Analisis Regresi Moderasi	72
c.	Uji Keberartian Regresi (Uji F)	73
d.	Uji Keberartian Koefisien Regresi (Uji t)	74
	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A.	Gambaran Objek Penelitian	76

Meli Kameliani, 2020

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN STATUS WILAYAH ADMINISTRATIF SEBAGAI VARIABEL MODERATOR (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali Tahun Anggaran 2014-2018)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

B.	Deskripsi Hasil Penelitian.....	79
1.	Rasio Derajat Desentralisasi pada kabupaten dan kota se-Jawa dan Bali ...	79
2.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada kabupaten dan kota se-Jawa dan Bali.....	87
3.	Rasio Efektivitas PAD pada kabupaten dan kota se-Jawa dan Bali	95
4.	Alokasi Belanja pada kabupaten dan kota se-Jawa dan Bali	97
C.	Analisis Data dan Pengujian Hipotesis Penelitian.....	99
1.	Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel Regresi Pertama	99
2.	Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel Regresi Moderasi	101
3.	Uji Asumsi Klasik	103
4.	Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian.....	105
a.	Analisis Regresi Linier Multipel Data Panel.....	105
b.	Analisis Regresi Moderasi.....	107
c.	Uji Keberartian Regresi (Uji F).....	109
d.	Uji Keberartian Koefisien Regresi (Uji t)	110
D.	Pembahasan Hasil Penelitian	114
1.	Pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap Alokasi Belanja Modal	115
2.	Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal.....	118
3.	Pengaruh Efektivitas PAD terhadap Alokasi Belanja Modal	120
4.	Pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Status Wilayah Administratif sebagai Variabel Moderator.....	122
5.	Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Status Wilayah Administratif sebagai Variabel Moderator	123
6.	Pengaruh Efektivitas PAD terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Status Wilayah Administratif sebagai Variabel Moderator.....	125
	BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	127
A.	Simpulan	127
B.	Saran	128
	DAFTAR PUSTAKA	130
	LAMPIRAN.....	138

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi	28
Tabel 2. 2 Kriteria Penilaian Tingkat Ketergantungan Daerah.....	28
Tabel 2. 3 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah	30
Tabel 2. 4 Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah	30
Tabel 2. 5 Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah.....	31
Tabel 2. 6 Penelitian Terdahulu	43
Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel	61
Tabel 3. 2 Populasi Penelitian.....	61
Tabel 4. 1 Kategorisasi Rata-Rata Derajat Desentralisasi Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali Tahun 2014-2018	79
Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif Derajat Desentralisasi Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali Tahun 2014-2018.....	85
Tabel 4. 3 Kategorisasi Rata-Rata Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali Tahun 2014-2018	88
Tabel 4. 4 Statistik Deskriptif Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali Tahun 2014-2018	93
Tabel 4. 5 Statistik Deskriptif Efektivitas PAD Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali Tahun 2014-2018	95
Tabel 4. 6 Statistik Deskriptif Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali Tahun 2014-2018.....	97
Tabel 4. 7 Hasil Uji <i>Chow</i> Regresi Pertama	99
Tabel 4. 8 Hasil Uji Hausman Regresi Pertama	100
Tabel 4. 9 Hasil Uji <i>Chow</i> Regresi Kedua (Moderasi)	101
Tabel 4. 10 Hasil Uji Hausman Regresi Kedua (Moderasi)	102
Tabel 4. 11 Uji Multikolinieritas Regresi Pertama	103
Tabel 4. 12 Uji Multikolinieritas Regresi Kedua (Moderasi)	103
Tabel 4. 13 Uji Heteroskedastisitas Regresi Pertama	104
Tabel 4. 14 Uji Heteroskedastisitas Regresi Kedua (Moderasi)	104
Tabel 4. 15 Regresi Data Panel Terpilih dengan <i>Fixed Effect Model</i>	106
Tabel 4. 16 Regresi Moderasi Data Panel Terpilih dengan <i>Fixed Effect Model</i> ..	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Rata-Rata Proporsi Belanja Langsung Pemerintah Daerah di Indonesia	4
Gambar 1. 2 Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah	7
Gambar 1. 3 Tren Alokasi Belanja Modal Tahun 2014-2018	7
Gambar 2. 1 Siklus APBD	21
Gambar 2. 2 Model Kerangka Pemikiran	56
Gambar 4. 1 Peta Rata-Rata Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2014-2018	80
Gambar 4. 2 Peta Rata-Rata Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018	81
Gambar 4. 3 Peta Rata-Rata Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018.....	82
Gambar 4. 4 Peta Rata-Rata Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2018.....	83
Gambar 4. 5 Peta Rata-Rata Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018.....	84
Gambar 4. 6 Peta Rata-Rata Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2014-2018	85
Gambar 4. 7 Grafik Rata-Rata Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali Tahun Anggaran 2014-2018.....	87
Gambar 4. 8 Peta Rata-Rata Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2014-2018	88
Gambar 4. 9 Peta Rata-Rata Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018	89
Gambar 4. 10 Peta Rata-Rata Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018.....	90
Gambar 4. 11 Peta Rata-Rata Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2018.....	91
Gambar 4. 12 Peta Rata-Rata Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018.....	92
Gambar 4. 13 Peta Rata-Rata Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2014-2018	93
Gambar 4. 14 Grafik Rata-Rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali Tahun Anggaran 2014-2018.....	95
Gambar 4. 15 Grafik Rata-Rata Efektivitas PAD Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali Tahun Anggaran 2014-2018	97
Gambar 4. 16 Grafik Rata-Rata Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali Tahun Anggaran 2014-2018.....	98
Gambar 4. 17 Kurva Distribusi t Dua Arah Hipotesis Pertama	111
Gambar 4. 18 Kurva Distribusi t Dua Arah Hipotesis Kedua (Moderasi).....	113

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1:

1. Tabulasi Data Penelitian
 1. Tabulasi Data Alokasi Belanja Modal Tingkat Provinsi
 2. Tabulasi Data Derajat Desentralisasi
 3. Tabulasi Data Kemandirian Keuangan Daerah
 4. Tabulasi Data Efektivitas PAD
 5. Tabulasi Data Alokasi Belanja Modal
2. Output Pengolahan Data dengan Program *Eviews 10*
 1. *Common Effect*
 2. *Fixed Effect*
 3. *Random Effect*
 4. Uji *Chow*
 5. Uji *Hausman*

LAMPIRAN 2:

1. Tabel F
2. Tabel t

LAMPIRAN 3

1. Surat Keputusan Pembimbing
2. Surat Keterangan Perbaikan Judul Skripsi
3. Frekuensi Bimbingan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, Suharsimi. (2014). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga
- Basuki dan Prawoto. *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers
- Darmawan, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Drs. Riduwan, M. B. A. (2009). *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: ALFABETA
- Erlina, dkk. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat
- Ferry, Prasetya. (2012). *Modul Ekonomi Publik: Teori Informasi Asimetris*
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim dan Kusufi. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Halim, Abdul. (2004). *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN
- Hasanah dan Fauzi. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: Penerbit IN MEDIA
- HAW. Widjaja. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, S.E., M.M. (2008). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kustiwan, Iwan. (2014). *Perencanaan Kota*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

- Lind, dkk. Teknik-Teknik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Salemba Empat
- Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Erlangga
- Mardiasmo. (2012). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Rahardjo, Adisasmita. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Riduwan dan Sunarto. (2010). Pengantar Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta
- Rohmana, Yana. (2010). Ekonometrika: Teori dan Aplikasi dengan Eviews. Bandung: Laboratorium Pendidikan Ekonomi dan Bisnis FPEB UPI
- Sekaran, Uma. (2006). Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat
- Sudjana. (2003). Teknik Analisis Regresi dan Korelasi. Bandung: PT Tarsito
- _____. (2005). Metode Statistika. Bandung: PT Tarsito
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2011). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- _____. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Syamsi, Ibnu. (1986). Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional. Jakarta: CV Rajawali.
- Ulum, Ihyaul. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang
- Widjaja, HAW. (2011). Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: Rajawali Pers

Jurnal:

- Ardhini dan Yuningsih. (2011). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah). Universitas Diponegoro
- Armawaddin, dkk. (2017). Analisis *Flypaper Effect* Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. Vol. 18, No. 2
- Asepma, dkk. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Riau. *Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau, Jurnal Sorot*. Vol, 10 No. 2
- Asri, Jatnika Sri (2016). Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 4 (2): 1021-1034
- Bolen, KK. (2019). The Effect of Financial Performance and Balanced Funds on Capital Expenditure of Local Government in District/City in Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*. Vol. 9, No. 4
- Eni dan Yuningsih. (2019). Analysis of Government Financial Performance: Allocation of Capital Costs. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 308
- Felicia A A. (2016). Pengaruh Rasio Ketergantungan, Kemandirian, Efisiensi dan Ruang Fiskal terhadap Alokasi Belanja Modal di Jawa Tengah. *Artikel Ilmiah*
- Halim dan Abdullah. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. Vol. 2, No. 1
- Halim dan Syukriy. (2003). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. *Simposium Nasional Akuntansi VI Yogyakarta*.

- Indra Praza, Eko. (2016). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol. 5 No. 1.
- Irmatus dan Agus. (2014). Analisis Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa. *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Julius, dkk. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, Vol. 7, No. 2
- Kadek dan Dwiranda. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10.2: 426-443
- Kuntari, dkk. (2019). Capital Expenditure of Local Governments, *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*. Vol. 23, No. 1
- Lucky, Dihan. (2013). Analysis of The Effect of Regional Financial Performance to Economic Growth and Poverty Through Capital Expenditure (Case Study of 38 Regencies/Cities in East Java Province. *Journal of Academics and Sustainable Development*, Vol. 4 No. 19
- Lufki dan Riyal. (2013). Alokasi Belanja Modal untuk Pelayanan Publik: Prakti di Pemerintah Daerah. *JAAI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol. 17 No. 2.
- Masaki, Takaaki (2018). The Impact of Intergovernmental Transfers on Local Revenue Generation in Sub-Saharan Africa: Evindence from Tanzania. Publish on Elsevier. *World Development* 106: 173-186
- Melatunan dan Pinatik (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sorong. *Jurnal EMBA*. Vo. 7 (2): 4134-4143
- Nadya, dkk. (2016). Kinerja Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik di Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 14 (2): 69-78

- Nurhayati dan Septiana. (2018). *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera. *Media Ekonomi* Vol. 26, No. 2: 111-120
- Pindonta dan Nurul. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Banten. *Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 3 No. 1
- Pratiwi, NA. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal. Artikel. Bandung: Program Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia
- Purnomo dan Achmad (2016). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah di Indonesia). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Putra, Ferdian. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2014). Universitas Negeri Padang
- Riswan dan Anthony A. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi pada Kabupaten/Kota Se-Sumatera). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 5 No. 2
- Rully dan Mulyani. (2014). Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Belanja Modal pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Ekonomi UPI*
- Sari, dkk. (2017). What is The Contribution of Local Original Revenue to Regional Financial Independent?. *Journal of Public Administration Studies University of Brawijaya*, Vol 3 (2): 78-81
- Solihin, Diky Ramadhan. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Ekonomi UPI*

- Sularso dan Restianto. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*. Vol 1 No. 2
- Supriyadi, dkk. (2017). Perbandingan Metode Partial Least Square (PLS) dan Principal Component Regression (PCR) untuk Mengatasi Multikolinieritas pada Model Regresi Linier Berganda.
- Suryantini, dkk. (2018). The Effect of Regional Financial Performance on Capital Expenditure and Economic Growth in Each District/Cities in Bali Province. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, Vol. VI No. 11.
- Suwandi dan Tahar. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta). *Jurnal InFestasi*, Vol. 11 (2) : 118-136
- Yacoub dan Lestari. (2019). Flypaper Effect in Indonesia: The Case of Kalimantan. *Universitas Tanjungpura*, 4 (4): 116-121

Undang-Undang:

- Peraturan Pemerintahan No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintahan No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintahan No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2017
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2015
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019

Meli Kameliani, 2020

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN STATUS WILAYAH ADMINISTRATIF SEBAGAI VARIABEL MODERATOR (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali Tahun Anggaran 2014-2018)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 58 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Permendagri No. 35 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Permendagri No. 13 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di
Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah

UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah direvisi dengan UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah

Data Pemerintah:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Periode 2014-2018

Buletin Teknis Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah. Komite Standar
Akuntansi Pemerintah (KSAP)

Data Ringkasan APBD 2018 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Laporan Realisasi Anggaran Periode 2014-2018

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019

Internet:

Abdullah, Syukriy. (2011). Apakah Perbedaan Antara Kabupaten dan Kota?
[online]. Tersedia:
[https://www.google.com/amp/s/syukriy.wordpress.com/2011/02/01/apakah-
perbedaan-antara-kabupaten-dan-kota/amp/](https://www.google.com/amp/s/syukriy.wordpress.com/2011/02/01/apakah-perbedaan-antara-kabupaten-dan-kota/amp/) [11 April 2020]

Meli Kameliani, 2020

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN STATUS WILAYAH ADMINISTRATIF SEBAGAI VARIABEL MODERATOR (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali Tahun Anggaran 2014-2018)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- Akbar, Syamsul. (2019). *Konsepsi, Tahapan dan Proses Penyusunan APBD sebagai Instrumen Pembangunan Daerah* [online]. Tersedia: <https://www.pontianakkota.go.id/pontianak-hari-ini/info-penting-lainnya/Konsepsi,-Tahapan-dan-Proses-Penyusunan-APBD-Sebagai-Instrumen-Pembangunan-Daerah> [11 Maret 2020]
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Situs Resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia
www.djpk.kemenkeu.go.id.
- Suwiknyo, E. (2019). *TREN APBN: Alokasi Belanja Modal Rendah* [online]. Tersedia: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190617/10/934374/trem-apbn-alokasi-belanja-modal-rendah> [10 Januari 2020]